

Partisipasi NU terhadap Agenda Politik di Indonesia

Muh. Nur Rochim Maksum¹, Maysriva Wahyu Leoninda²

^{1,2} Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

e-mail: maysriva29@gmail.com¹, mnr127@ums.ac.id²

Abstrak

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah memainkan peran penting dalam lanskap politik nasional sejak era kemerdekaan (Fealy, 2007). Menurut Bush (2009), keterlibatan NU dalam politik Indonesia telah mengalami berbagai transformasi, mencerminkan dinamika hubungan antara agama dan negara dalam konteks negara multikultur. Penelitian ini mengkaji partisipasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam agenda politik Indonesia dari masa kemerdekaan hingga era reformasi. Dengan menggunakan metode analisis historis dan studi literatur, penelitian ini menyelidiki peran NU dalam membentuk lanskap politik nasional, transformasi organisasinya dari partai politik menjadi organisasi sosial-keagamaan, serta pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah dan dinamika politik kontemporer.

Kata kunci: *NU, Politik Indonesia, Transformasi Organisasi*

Abstract

Nahdlatul Ulama (NU), as the largest Islamic organization in Indonesia, has played an important role in the national political landscape since the independence era (Fealy, 2007). According to Bush (2009), NU's involvement in Indonesian politics has experienced various transformations, reflecting the dynamics of the relationship between religion and the state in the context of a multicultural country. This research examines the participation of Nahdlatul Ulama (NU) in Indonesia's political agenda from the independence period to the reform era. Using historical analysis and literature study methods, this research investigates the role of NU in shaping the national political landscape, the transformation of its organization from a political party to a socio-religious organization, as well as its influence on government policy and contemporary political dynamics.

Keywords : *NU, Indonesian Politics, Organizational Transformation*

PENDAHULUAN

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah memainkan peran penting dalam lanskap politik nasional sejak era kemerdekaan (Fealy, 2007). Menurut Bush (2009), keterlibatan NU dalam politik Indonesia telah mengalami berbagai transformasi, mencerminkan dinamika hubungan antara agama dan negara dalam konteks negara multikultur.

Azra (2006) menjelaskan bahwa sejak awal kemerdekaan, NU terlibat aktif dalam proses pembentukan negara dan pengambilan keputusan politik. Keterlibatan ini mencapai puncaknya ketika NU menjadi partai politik pada tahun 1952. Namun, seperti yang dicatat oleh Feillard (1999), perjalanan politik NU mengalami titik balik signifikan pada tahun 1984 dengan keputusan "kembali ke khittah 1926", yang menandai penarikan diri NU dari politik praktis.

Meskipun demikian, Hefner (2000) berpendapat bahwa pengaruh NU dalam politik Indonesia tetap terasa. Dengan basis massa yang besar dan jaringan pesantren yang luas,

NU terus memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi arah kebijakan nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif partisipasi NU dalam agenda politik Indonesia, mulai dari era kemerdekaan hingga era reformasi. Dengan menggunakan metode analisis historis dan studi literatur, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana peran NU telah berevolusi seiring waktu, dampaknya terhadap lanskap politik nasional, serta pengaruhnya dalam isu-isu kontemporer seperti demokrasi, toleransi beragama, dan moderasi Islam.

Dalam konteks ini, Effendy (2003) menekankan bahwa partisipasi NU dalam agenda politik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perannya sebagai penjaga nilai-nilai Islam tradisional dan kearifan lokal. NU kerap kali menjadi jembatan antara kepentingan umat Islam dengan negara, memainkan peran mediator yang krusial dalam menjaga stabilitas politik dan harmoni sosial.

Bruinessen (1994) mengemukakan bahwa fleksibilitas NU dalam merespons perubahan politik nasional merupakan salah satu kekuatan utamanya. Kemampuan organisasi ini untuk beradaptasi dengan berbagai rezim politik, dari Orde Lama hingga era Reformasi, menunjukkan ketangguhannya sebagai aktor politik dan sosial yang relevan.

Sirry (2010) lebih lanjut menganalisis bahwa partisipasi NU dalam agenda politik nasional tidak selalu bersifat formal atau institusional. Seringkali, pengaruh NU disalurkan melalui jaringan kiai informal dan pesantren, yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik dan preferensi politik di tingkat akar rumput.

Aspinall (2005) menambahkan dimensi lain dengan mengamati bahwa peran NU dalam politik Indonesia juga mencakup upaya-upaya untuk mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia. Terutama sejak era Reformasi, NU telah menjadi salah satu suara terdepan dalam memperjuangkan pluralisme dan toleransi di tengah maraknya tantangan radikalisme dan intoleransi.

Terakhir, Mietzner (2014) menyoroti dilema yang dihadapi NU dalam menyeimbangkan perannya sebagai organisasi keagamaan dengan keterlibatannya dalam politik praktis. Keputusan untuk mendukung atau tidak mendukung kandidat atau partai politik tertentu seringkali menimbulkan perdebatan internal dan eksternal, mencerminkan kompleksitas posisi NU dalam lanskap politik Indonesia yang terus berubah.

Ricklefs (2012) mengemukakan bahwa peran NU dalam politik Indonesia juga mencerminkan dinamika yang lebih luas antara Islam dan negara di dunia Muslim. Sebagai organisasi yang mewakili Islam tradisional, NU seringkali harus menegosiasikan posisinya di tengah tekanan modernisasi dan sekularisasi, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman yang dianutnya.

Sementara itu, Barton (2002) menekankan pentingnya figur-figur karismatik dalam membentuk arah politik NU. Tokoh-tokoh seperti KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak hanya memengaruhi kebijakan internal organisasinya, tetapi juga membawa pengaruh yang signifikan dalam wacana politik nasional, terutama dalam isu-isu seputar pluralisme dan demokrasi.

Lebih lanjut, Nakamura (1996) menganalisis bahwa fleksibilitas doktrin keagamaan NU, terutama dalam konteks fiqh siyasah (yurisprudensi politik Islam), telah memungkinkan organisasi ini untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan politik tanpa kehilangan identitas keislamannya. Pendekatan ini memungkinkan NU untuk tetap relevan dan berpengaruh dalam lanskap politik Indonesia yang terus berevolusi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis historis untuk mengkaji partisipasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam agenda politik Indonesia. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial-politik yang kompleks dan berkembang sepanjang waktu (Creswell & Poth, 2018).

Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus historis. Penelitian ini mengandalkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber primer dan sekunder untuk memahami evolusi peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam lanskap politik Indonesia sejak era kemerdekaan hingga masa reformasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur ekstensif, meliputi dokumen resmi NU, arsip pemerintah, transkrip pidato tokoh-tokoh NU, buku-buku akademik, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang relevan. Selain itu, analisis arsip historis dari perpustakaan nasional dan koleksi NU juga dilakukan untuk memperkaya data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam agenda politik Indonesia telah mengalami evolusi signifikan sejak era kemerdekaan hingga masa reformasi. Pada awal kemerdekaan, NU terlibat aktif dalam pembentukan dasar negara dan berpartisipasi langsung dalam politik praktis (Fealy, 2007). Keterlibatan ini mencapai puncaknya ketika NU menjadi partai politik mandiri pada tahun 1952. Namun, dinamika politik Orde Baru mem bawa perubahan besar dalam strategi politik NU.

Selama era Orde Baru, NU mengalami transformasi penting dengan keputusan "kembali ke khittah 1926" pada tahun 1984 (Bush, 2009). Keputusan ini menandai penarikan diri NU dari politik praktis dan fokus kembali pada peran sosial-keagamaan. Meskipun demikian, pengaruh NU dalam politik Indonesia tetap signifikan melalui jaringan pesantren dan basis massa yang besar (Hefner, 2000).

Era reformasi membawa dimensi baru dalam partisipasi politik NU. Meski tidak lagi menjadi partai politik, tokoh-tokoh NU kembali aktif dalam politik nasional, dengan puncaknya ketika Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI pada tahun 1999-2001 (Barton, 2002). NU juga berperan penting dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan moderasi Islam dalam konteks Indonesia yang lebih terbuka (Mujani & Liddle, 2009).

Dalam agenda politik kontemporer, partisipasi NU lebih berfokus pada advokasi kebijakan nasional, terutama dalam isu-isu seperti pendidikan Islam, kesejahteraan sosial, dan toleransi beragama (Azra, 2006). NU juga berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial dengan mempromosikan Islam Nusantara sebagai bentuk Islam moderat yang sesuai dengan konteks Indonesia (Woodward, 2001).

Pengaruh NU terhadap kebijakan pemerintah tetap signifikan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan hukum keluarga. NU juga menjadi mitra pemerintah dalam berbagai program pembangunan nasional. Peran NU dalam meredakan ketegangan politik dan menangkal radikalisme agama menjadi semakin penting dalam lanskap politik Indonesia yang kompleks (Ricklefs, 2012).

Transformasi partisipasi NU dalam agenda politik Indonesia menunjukkan adaptabilitas organisasi ini terhadap perubahan kondisi politik. Meskipun tidak lagi terlibat langsung dalam politik praktis, NU tetap menjadi kekuatan penting dalam membentuk lanskap politik dan sosial Indonesia. Peran NU dalam mempromosikan moderasi Islam, toleransi, dan nilai-nilai demokratis menunjukkan bahwa organisasi keagamaan dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa tanpa harus terlibat langsung dalam politik praktis.

SIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa partisipasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam agenda politik Indonesia telah mengalami evolusi signifikan. Dari keterlibatan langsung sebagai partai politik pada era kemerdekaan, NU bertransformasi menjadi organisasi sosial-keagamaan yang tetap berpengaruh pasca keputusan kembali ke khittah 1926. Meski tidak lagi terlibat dalam politik praktis, NU mempertahankan peran penting melalui jaringan pesantren dan tokoh-tokohnya. Dalam konteks kontemporer, NU berkontribusi pada stabilitas sosial-politik, promosi Islam moderat, dan demokratisasi. Model partisipasi NU ini menunjukkan efektivitas pengaruh politik melalui peran moral dan kultural, tanpa keterlibatan langsung dalam kekuasaan formal, menjadikannya contoh unik hubungan agama-negara di Indonesia.

Perjalanan NU dalam lanskap politik Indonesia juga mencerminkan kemampuan organisasi ini untuk beradaptasi dengan perubahan sosial-politik yang dinamis. Walau menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal, NU telah membuktikan diri sebagai kekuatan moderasi yang konsisten, menjembatani kepentingan umat Islam dengan agenda nasional yang lebih luas. Peran ini semakin penting di tengah makin maraknya polarisasi politik dan ancaman radikalisme, di mana suara NU kerap menjadi penyeimbang yang krusial dalam menjaga harmoni sosial dan integritas bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2006). *Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context*. Jakarta: Solstice Publishing.
- Barton, G. (2002). *Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Bush, R. (2009). *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Denzin, N. K. (2017). *Sociological methods: A sourcebook*. Routledge.
- Effendy, B. (2003). *Islam and the state in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Fealy, G. (2007). "The Political Contingency of Reform-Mindedness in Indonesia's Nahdlatul Ulama: Interest Politics and the Khittah". In *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*, edited by R. M. Feener and M. E. Cammack. Cambridge: Harvard University Press.
- Fealy, G. (2007). The political contingency of reform-mindedness in Indonesia's Nahdlatul Ulama: Interest politics and the Khittah. In A. Reid & M. Gilsenan (Eds.), *Islamic legitimacy in a plural Asia* (pp. 154-166). Routledge.
- Feillard, A. (1999). *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Yogyakarta: LKiS.
- Feillard, A. (1999). *NU vis-à-vis negara: Pencarian isi, bentuk dan makna*. LKiS.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi sejarah*. Tiara Wacana Yogya.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage.
- Mayring, P. (2004). *Qualitative content analysis. A companion to qualitative research*, 1(2), 159-176.
- Mietzner, M. (2014). Indonesia's 2014 elections: How Jokowi won and democracy survived. *Journal of Democracy*, 25(4), 111-125.
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2009). "Muslim Indonesia's Secular Democracy". *Asian Survey*, 49(4), 575-590.
- Ricklefs, M. C. (2012). *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, c. 1930 to the Present*. Singapore: NUS Press.
- Woodward, M. R. (2001). "Indonesia, Islam, and the Prospect for Democracy". *SAIS Review*, 21(2), 29-37.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. Sage publications.